

## **PERDAGANGAN ORANG BUGIS DI KAWASAN TELUK TOMINI MASA KOLONIAL BELANDA**

**Hasanuddin**

Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado  
Jalan Katamso, Bumi Beringin Lingkungan Manado  
Telepon (0431) 864926 Faksimile (0431) 864926  
Pos-el: anwar\_hasanuddin@yahoo.com

### **Abstrak**

*Perdagangan orang Bugis di kawasan Teluk Tomini didorong karena tradisi yang kuat tentang *sompeq* (merantau). Pedagang dan perantau Bugis keluar mencari kekayaan dan kejayaan di kawasan Teluk Tomini. Mereka dengan perahu tradisionalnya menjadi urat nadi bagi kehidupan perekonomian di kawasan Teluk Tomini, sampai di pedalaman melalui pelayaran pantai dan sungai. Komoditas utama adalah emas, bijih besi, budak, sisik penyu, teripang, kayu cendana, kopra, damar, dan rotan. Barang dagangan tersebut dipasarkan ke Ternate, Singapura, dan Makassar. Masa kekuasaan VOC kemudian Pemerintah Hindia Belanda telah menjadi persaingan pedagang Bugis untuk memperebutkan produk emas dan budak, walaupun dikeluarkan kebijakan untuk mempersempit usahanya tetapi pedagang Bugis tetap menguasai perdagangan, utamanya emas dan budak. Faktor ini menyebabkan munculnya perkampungan-perkampungan Bugis, dan beberapa di antaranya berhasil dikuasainya. Secara *de facto* pedagang Bugis memegang hegemoni politik dan ekonomi di kawasan Teluk Tomini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yaitu studi pustaka dengan mengumpulkan data-data sejarah, dengan menguraikan suatu peristiwa ke dalam bagian-bagiannya dalam rangka memahami peranan pedagang Bugis dalam jalur perdagangan dan kekuasaannya di kawasan Teluk Tomini.*

**Kata kunci:** Bugis, perdagangan, Teluk Tomini, Pemerintah Hindia Belanda

## **BUGIS SAILING AND TRADING IN TOMINI BAY REGION**

### **Abstract**

*Bugis trading in Tomini bay region was done in supporting of tight tradition about *sompeq* (wander about). Merchant and *sompeq* of Bugis leave their land to seek for welfare and glory in Tomini Bay. They used traditional ship that became the core of economical life in Tomini Bay through beach and river sailing. The importance commodity was produced mostly by merchant communities such as gold, slave, and scale of turtle, tripang, yellow sandalwood, copra, resin, and rattan. Those commodities were marketed to Ternate, Singapore, and Makassar. VOC reign and then Dutch Indies had been rivals for Bugis merchants in selling gold and slave. Although there was a policy for Bugis traders to limit their activities, but Bugis traders still held and mastered in trading, particularly for gold and slave. This factor stimulated emerge of Bugis districts and some of them were colonized. Bugis traders held political hegemony *de facto* and economy in Tomini Bay. This research was conducted using library research and analytical description method by describing events to their parts in understanding the role of Bugis traders in trading line and their power in Tomini Bay.*

**Keywords:** Bugis, trading, Tomini Bay, Dutch Indies Government.

### **I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang membentang dari barat ke timur (Sabang sampai Merauke), dan utara ke selatan (Miangas sampai Rotte). Kondisi ini mempengaruhi keadaan masyarakat yang mendiami wilayah-wilayah tersebut, sehingga muncul berbagai suku bangsa yang kesemuanya memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi tradisi maupun pola kehidupan sosialnya. Terlepas dari itu semua wilayah Indonesia yang sebagian besar berbatasan dengan laut, menghasilkan sebagian masyarakatnya melakukan aktivitas dan mencari kehidupan dari laut.

Bangsa Indonesia telah memahami arti penting kawasan maritim, karena luas wilayah

lautnya lebih besar dari wilayah daratannya. Selain itu dapat berfungsi sebagai landasan dalam mengukuhkan kembali kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang hidup di negara kepulauan. Kawasan Teluk Tomini salah satunya telah menjadi perhatian nasional dan internasional sejak dilaksanakannya kegiatan, Sail Tomini tanggal 20 September 2015 yang dipusatkan di Parigi, Kabupaten Parigi Moutong.

Menurut Mahan bahwa apabila keadaan suatu negeri memungkinkan penduduknya untuk turun ke laut, maka mereka akan lebih bergairah untuk mencari hubungan ke luar melalui laut. Dorongan untuk menjalin hubungan ke luar berkaitan dengan kecenderungan penduduknya untuk berdagang (Poelinggomang, 2002:13) dan mencari daerah baru atau kegiatan ekspansi.

Jaringan pelayaran Bugis menyinggahi jalur-jalur perdagangan, seperti Sulu, Banjarmasin, Palembang, Johor, Pahang, dan Aceh. Perahu Bugis juga menyinggahi berbagai pelabuhan di pesisir timur Kalimantan, seperti Kutai Pasir, dan Samarinda. Demikian pula mereka menyinggahi Maluku, Ternate, Banda, dan pesisir timur Irian Jaya. Di Sulawesi, menyinggahi Kaili, Bone, Gorontalo, Manado, dan Kema. Pada umumnya pelabuhan yang telah disinggahi dijadikan sebagai koloni dagang (Asba, 2007:79).

Pelayaran Bugis dalam periode abad ke-19 meliputi hampir seluruh perairan Nusantara, kegiatan pelayaran Bugis telah dikunjungi dari Singapura hingga Papua, dan di bagian wilayah selatan dari Sulu, Filipina Selatan hingga Darwin (Australia). Hampir seluruh daerah yang disinggahi dikembangkan menjadi kota-kota pantai sebagai pusat aktivitas perdagangannya. Bahkan di beberapa daerah mampu mendirikan kerajaan-kerajaan (Pelras, 2006: 4). Kajian tentang *Sawerigading* dalam epos *La Galigo* dapat memberi petunjuk tentang luasnya daerah-daerah yang dikunjungi. Gambaran jelas tentang pelayaran Bugis diperoleh dari catatan hukum laut *Ammana Gappa* yang juga melampirkan peta laut Bugis (Tobing, 1977).

Kegiatan pelayaran dan perdagangan di kawasan Teluk Tomini yang paling utama adalah tersedianya pemasaran barang ekspor dan impor, seperti emas, budak, sisik penyu, bijih besi, kopi, kopra, kayu cendana, damar, dan rotan. Begitu pula komoditi dari luar dibawa berupa opium Cina, guci, kain, dan beras secara langsung membawa pengaruh terhadap kemajuan pelayaran dan perdagangan di Teluk Tomini. Pelayaran dan perdagangan prinsipnya melakukan usaha-usaha untuk mencari keuntungan ekonomis (*vent for surplus*) dan pertukaran budaya (*cross cultural trade*).

Aktivitas perdagangan orang Bugis, menurut Dick dalam kajian ekonomi maritim melihat pentingnya jaringan perdagangan dalam membentuk hubungan pulau-pulau di Nusantara. Dick juga menganalisis jaringan perdagangan kelompok etnik melalui perahu layar yang dapat berperan utama dalam pembentukan jaringan perdagangan. Pelayaran perahu layar yang membentuk solidaritas kelompok etnik sangat berperan dalam menghalangi monopoli KPM di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Tingginya solidaritas etnik Bugis, Makassar, Buton, dan Madura membuat mereka bertahan dalam pelayaran, bahkan mereka menguasai tempat-tempat pelayaran yang tidak dijangkau oleh KPM (Dick, 1975: 69-107).

Menurut Pelras (2006:5) bahwa orang Bugis merupakan pedagang antarpulau yang disegani, dan kuatnya pengaruh pedagang Bugis ternyata membawa fenomena baru setelah munculnya diaspora Bugis, kemudian membentuk perkampungan Bugis dan banyak dijumpai seperti Parigi, Gorontalo, Banggai, Ampana, Tojo, Togian, Ampibabo, Kasimbar, dan Tomini. Kemampuan menyesuaikan diri merupakan modal terbesar yang memungkinkan orang Bugis dapat bertahan di daerah koloninya selama berabad-abad. Menariknya, walau mereka terus

menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya, orang Bugis tetap mampu mempertahankan identitas .ke-Bugis-an. mereka. Walaupun demikian, proses hubungan interaksi membawa transformasi budaya pada penduduk setempat, sehingga terjadi adopsi dan adaptasi budaya yang semakin memperkaya bentuk kebudayaan.

Bagi orang Bugis merantau adalah bagian yang tidak terpisahkan dari budayanya, *sompeq* (merantau) menyebut dirinya apabila meninggalkan kampung halamannya. *Sompeq* merupakan kisah yang sangat tua dalam sejarah peradaban Bugis. Mereka menganggap bahwa belumlah sempurna kehidupan seseorang tanpa melalui satu fase dalam hidupnya yakni sebagai *passompeq*, "selama laut masih berombak, maka pasir di pantai tak akan pernah tenang". Ungkapan ini yang memacu keresahan orang-orang Bugis yang belum pernah merasakan merantau dan berlayar (Rahman, 2006:409).

Selain itu, hubungan pelayaran dan perdagangan di kawasan Teluk Tomini tidak terlepas dari aktivitas bajak laut/perompak. Para bajak laut aktif melakukan perompakan di Teluk Tomini utamanya bajak laut Tobelo dan Mangindanao turut mewarnai dinamika pelayaran dan perdagangan di kawasan itu. Bajak laut disebut sebagai orang yang melakukan tindakan kekerasan di laut, tanpa mendapat wewenang dari pemerintah untuk melakukan tindakan itu (Lapian, 2011:163).

Penulisan ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana kegiatan orang Bugis dalam pelayaran dan perdagangan, kemudian bagaimana koloni dan kekuasaan Bugis di kawasan Teluk Tomini dalam menghadapi kekuasaan kolonial Belanda. Meskipun tidak semua peristiwa tercantum dalam tulisan ini, namun diharapkan dapat menelusuri dan mengungkapkan proses pelayaran dan perdagangan Bugis, dan munculnya perkampungan Bugis di kawasan Teluk Tomini. Penelitian ini dapat membantu mengingatkan kembali jalur perdagangan dan perkapungan Bugis yang dapat menjadi acuan bagi kebijakan pembangunan masa kini dan akan datang.

Prosedur penelitian sejarah melalui beberapa tahap, pertama adalah mengumpulkan data-data sejarah (*heuristik*) dilakukan dengan proses menemukan sumber-sumber sejarah. Oleh karena penelitian ini tentang pelayaran dan perdagangan orang Bugis, mencakup periode kolonial Belanda, maka sumber primer berupa arsip-arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) seperti arsip *Koloniaal Verslag* (KV), perjanjian atau kontrak dengan kolonial Belanda, serta surat kabar. Adapun sumber sekunder berupa buku-buku hasil kajian tentang pelayaran dan perdagangan didapatkan di perpustakaan.

Sumber-sumber primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dikoreksi ulang, dipelajari kemudian dipertimbangkan, mana yang sesuai dengan pokok masalah. Selanjutnya dilakukan kritik sumber baik otentitas atau keabsahan sumber sebagai kritik ekstern maupun kredibilitas atau bisa tidaknya dipercaya sumber tersebut. Selanjutnya dilakukan *interpretasi* dengan merangkai, menghubungkan, dan menerangkan data-data sejarah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Tahapan ini berupa rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh.

Ruang lingkup fokus penelitian di Teluk Tomini adalah wilayah Gorontalo, Parigi dan Banggai ditentukan oleh letaknya yang strategis dalam pelayaran dan perdagangan di Teluk Tomini. Sepanjang pengetahuan belum pernah diadakan penelitian pelayaran dan perdagangan orang Bugis di kawasan Teluk Tomini. Umumnya karya tentang Gorontalo, Parigi dan Banggai hanya menyoroti masalah peristiwa-peristiwa dalam politik kerajaan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini kiranya dapat merupakan suatu awal untuk mendekati dan mempelajari kawasan Teluk Tomini dalam pelayaran dan perdagangan.

Jangkaun temporal dibatasi periode kekuasaan kolonial Belanda, sehingga terjadi

perubahan susunan tatanegara Hindia Belanda. Secara formal Gorontalo dan Parigi dipisahkan dari Karesidenan Ternate dan dimasukkan dalam Karesidenan Manado. Pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan perluasan jalur serta peraturan pelayaran dan perdagangan. Selain itu, masuknya *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) akhir abad ke-19 di kawasan Teluk Tomini turut mewarnai dinamika pelayaran dan perdagangan, serta perkembangan teknologi sarana transportasi.

## II. PEMBAHASAN

### A. Jalur Perdagangan Regional

Kegiatan pelayaran dari luar wilayah Teluk Tomini dapat memasuki Teluk Tomini melalui tiga arah. *Pertama*, dari sebelah utara melalui Laut Cina Selatan melewati Laut Sulu, kemudian memasuki Laut Maluku. *Kedua*, jalur sebelah timur melalui pelayaran dari Samudera Pasifik dan Laut Maluku. *Ketiga*, Laut Jawa menghubungkan Laut Flores menuju Buton, Kendari, Teluk Tolo, dan Pulau Banggai. Para pedagang Bugis melalui jalur ketiga dalam melakukan perjalanan ke Maluku pada bulan Desember dan Maret, dengan berlayar searah angin musim barat. Berangkat dari pantai sebelah timur Sulawesi Selatan melalui jalur sebelah utara melalui Kendari, Teluk Tolo, Teluk Tomini, Ternate, Halmahera Utara, dan Papua (Pelras, 2006:363).

Kawasan Teluk Tomini bersinggungan langsung dengan tiga wilayah provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo dengan luas perairan sekitar 59.500 km<sup>2</sup>. Garis pantai Teluk Tomini terpanjang berada di Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah sekitar 1.179 km, Provinsi Sulawesi Utara sepanjang 784,94 km, dan Provinsi Gorontalo sepanjang 436,52 km.

Kawasan Teluk Tomini adalah salah satu teluk terluas yang berada di Pulau Sulawesi. *International Hydrographic Organization* (IHO) mendefinisikan Teluk Tomini sebagai bagian dari perairan East Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia Timur. Dalam publikasi ilmiahnya *Limits of Oceans and Seas* (edisi ke-3, tahun 1953), Teluk Tomini berada pada catatan nomor 48d. IHO mendefinisikan batas timur Teluk Tomini sebagai "batas barat Laut Maluku", yang diartikan sebagai Tanjung Pasir Panjang (0°39'S 123°25'E) dan Tanjung Tombalilatu (123°21'E) di pesisir yang berseberangan ("*Limits of Oceans and Seas*, 3rd edition". *International Hydrographic Organization*, 1953, hlm. 25. <https://epic.awi.de/29772/1/IHO1953a.pdf>). Di tengah-tengah Teluk Tomini terdapat 56 pulau yang dikenal dengan nama Kepulauan Togian, dan di antaranya terdapat enam pulau termasuk kategori pulau besar yaitu Pulau Una-Una, Batulada, Togeana dan Talatakoh, Waleakodi, dan Waleabahi.

Teluk Tomini merupakan salah satu wilayah strategis di bagian tengah Pulau Sulawesi. Kondisi lautnya yang luas dan aman dari terjangan ombak besar, yang paling utama adalah kaya akan potensi alam dan menghasilkan komoditas perdagangan utama adalah emas, bijih besi, budak, sisik penyu, kerang laut, teripang, kayu cendana, kopra, rotan, damar, dan pewarna kayu.

Perdagangan maritim Bugis dikembangkan oleh pelaut Bone yang bermukim di Cendrana, Bajoe, dan Kajuara. Selain pelaut Bone, pelaut Wajo dari Danau Tempe atau Sungai Cendrana berlayar dari pelabuhan kecil mereka sendiri di Doping dan Pineki ke Makassar, dimana orang Wajo memiliki komunitas tersendiri yang cukup penting posisinya (Pelras, 2006: 303).

Pada akhir abad ke-16, kegiatan pelayaran dan perdagangan di kawasan Teluk Tomini

telah dijalankan oleh para pedagang Bugis dengan menggunakan perahu-perahu tradisional. Di Gorontalo, pedagang Bugis telah lama melakukan perdagangan dengan para bangsawan Gorontalo. Beberapa di antaranya menggunakan jenis perahu-perahu lebih besar yang telah disewa oleh para pedagang Cina, dan kemudian membawa langsung barang dagangan mereka ke Cina. Perahu-perahu milik Bugis memegang peranan penting dalam kehidupan perekonomian di daerah pesisir dan pedalaman.

Faktor ini didukung oleh jenis perahunya yang ramping dan memiliki akselerasi dan kemampuan bergerak cepat, meskipun tempat penampungan barang dagangannya terbatas. Kegiatan pelayaran Bugis menjadi urat nadi bagi kehidupan perekonomian di kawasan Teluk Tomini sampai utara Sulawesi (Juwono dan Hutagalung, 2005: 20).

Pada tahun 1669, Banggai berada di bawah kekuasaan Ternate, namun wilayah Banggai terus dipengaruhi oleh kekuatan Bone. Para pedagang Bugis sering mengunjungi pesisir Banggai dan dianggap Ternate telah mengganggu kekuasaannya. Begitu pula di Tobungku wilayah pinggiran Ternate, mendapat perhatian dari VOC sebagai daerah „impian para penyelundup.. Pedagang Bugis dari Malaka singgah ke pelabuhan Tobungku, karena dikenal sebagai penghasil budak, rempah-rempah, tempurung penyu, lilin, tembakau, dan banyak produk lainnya ditemukan dengan harga lebih murah daripada harga yang ditetapkan oleh Belanda. Ketika VOC kekurangan barang dagangan berupa tempurung penyu, maka Tobungku menjadi pemasok tempurung penyu yang berkualitas, yang didatangkan dari Togian dan Pulau Banggai. Tobungku juga penghasil bijih besi dalam jumlah besar, dan berkualitas tinggi dibandingkan dengan bijih besi yang ditemukan di sekitar Danau Matano di Luwu (Andaya, 2015:102-103).

Para pedagang Bugis berlabuh di pelabuhan guna mengumpulkan produk komunitas sekaligus sebagai titik pemberangkatan pelayaran dagang mereka menuju pelabuhan utama di kawasan Nusantara dan Singapura. Di utara dan tengah Pulau Sulawesi mereka membawa serbuk emas, kayu cendana, sarang burung, dan cangkang penyu. Sekembalinya dari Singapura, mereka membawa opium Cina, peralatan dapur Cina, sutra mentah Cina, kain wol Eropa, dan komoditas lainnya (Pelras, 2006:362).

Di Gorontalo, pedagang Bugis menguasai produk serbuk emas juga menarik perhatian orang Portugis, budak dan kulit kerang. Ekspor tambang lainnya berupa besi, tembaga, dan timah hitam dari Banggai juga berada di bawah kekuasaan pedagang Bugis dan membawanya ke Ternate (Pelras, 2006: 144). Aktivitas pedagang Bugis mendorong VOC berusaha untuk melakukan monopoli produk barang dan menguasai Gorontalo. Pada 27 September 1677, Robertus Padtbrugge (Gubernur Maluku) bersama pembesar Ternate mengunjungi Gorontalo, dan Padtbrugge menekan kekuasaan *Olongia* Gorontalo melalui Perjanjian Bungaya (Hasanuddin dan Amin, 2012:57-59).

Walaupun *Olongia* Gorontalo merasa keheranan atas kekuasaan Ternate, kemudian disepakati perjanjian yang memuat 8 pasal, antara lain pada pasal 1 adalah Sungai Gorontalo harus dibuka bagi pelayaran kapal milik VOC; pasal 2 yakni Gorontalo harus menyetor produk kelapa, kentang, gandum, ubi, dan katun dalam jumlah tertentu; dan pasal 4 bahwa Gorontalo harus menyetor berupa damar, rotan, keranjang, dan bahan tali (Juwono dan Hutagalung, 2005:74-75).

Perjanjian diperbarui pada 25 Maret 1678 antara Padtbrugge dengan Kuicil Bya sebagai *Olongia* Gorontalo dan perwakilan Limboto dipimpin *Kapitalau* Kuicil Golade dan Kuicil Pomaele di Ternate. Isi perjanjian di antaranya pasal 17 bahwa Gorontalo dan Limboto melarang berdagang bagi pedagang pribumi dan pedagang Eropa lainnya terutama musuh VOC (Juwono dan Hutagalung, 2005:76-81). Jadi jelas bahwa VOC mulai menguasai

pelayaran dan perdagangan, dengan melarang orang Bugis berdagang di Gorontalo. Kekuasaan VOC dapat memberi cerminan bahwa sebelumnya Gorontalo mempunyai potensi bagi kemajuan perdagangannya.

Perdagangan semakin dinamis setelah terlibatnya pedagang Cina dari Gorontalo yang memiliki hubungan dagang dengan pedagang Bugis. Beredarnya *kepeng* Cina sebagai nilai tukar membawa dampak negatif bagi perdagangan Belanda. Sebaliknya, barang-barang dagangan, seperti candu, senjata api, dan mesiu dari pedagang Cina dibeli oleh pedagang Bugis, dan dijual kepada bangsawan Gorontalo. Candu menjadi komoditas penting dalam kehidupan bangsawan, demikian juga senjata api dan mesiu dijual para bajak laut Mangindano kepada Syahbandar Gorontalo. Syahbandar kemudian menjualnya kepada *Olongia* dan para bangsawan Gorontalo dengan membayarnya dalam bentuk emas, karena emas digunakan sebagai alat pembayaran (Juwono dan Hutagalung, 2005:160).

Di Tinombo, pedagang Bugis telah lama menjalin perdagangan dengan penguasa Tinombo. Awal abad ke-19, kapal Bugis sering berlabuh di pantai Tinombo dengan membawa keramik, barang pecah belah, kain dan kuningan. Setelah berdagang, mereka mengangkut damar, rotan, dan *use timpaus* (binatang untuk bahan obat-obatan Cina). Selama dalam berdagangnya, mereka membangun pemukiman kontemporer di pesisir Tinombo (Nourse, 2005:224-225).

Di Kwandang (utara Gorontalo) ramai dikunjungi kapal-kapal dagang, di antaranya perahu Bugis jenis *padewakang* yang memuat katun dan gula dalam bentuk kaleng berukuran 15 sampai 25 *bahar* dari Surabaya, dan dipasarkan ke pedalaman pantai utara. Sekembalinya, perahu-perahu *padewakang* mengangkut beras, rotan, dan damar (Juwono dan Hutagalung, 2005: 22-23). Awalnya penduduk belum mengetahui nilai produk damar (getah kopal) dan rotan. Setelah masuknya pedagang Cina dan Eropa dengan memborongnya, maka penduduk mulai mengusahakannya (Hoevel, 1891:15). Komoditas rotan kualitasnya sangat baik dengan ekspor setiap tahun sekitar 2.000 pikul dan harga *f.* 11.000. Selain rotan, damar merupakan barang dagangan terpenting, setiap tahunnya damar diekspor sekitar 21.000 pikul dengan harga *f.* 350.000 (Haga, 1931:75).

Pada tahun 1870-1873, para pedagang Bugis dan Makassar membeli dalam jumlah besar produk damar dan rotan dari Gorontalo. Sebuah tulisan dalam koran *De Java Bode* menunjukkan bagaimana jumlah ekspor dari pelabuhan Gorontalo terus meningkat sejak tahun 1870. Hal ini disebabkan *Olongia* dan bangsawan Gorontalo memaksa rakyatnya untuk membawa produk damar dan rotan dan kemudian dibeli dengan harga murah, sehingga menghasilkan keuntungan besar (Java Bode, 19 Juni 1890: lembar ke-1).

## **B. Perdagangan Emas**

Produk emas menjadi barang utama dalam jalur perdagangan di Gorontalo, terkenal dengan emas berkualitas kadar karat yang tinggi. Pedagang Belanda dan Bugis bersaing dalam menguasai produk emas. Pada 31 Januari 1729, Gubernur Maluku Pielat mengeluarkan keputusan melarang semua pedagang mendekati daerah tambang-tambang emas (Juwono dan Hutagalung, 2005:125-126). Untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan perdagangan emas, VOC mendirikan pos-pos di Gorontalo. Bahkan pada 1747-1795, di Parigi terdapat benteng VOC yang letaknya terpencil, dan berfungsi sebagai tempat penampungan emas (Henley, 2005:41).

Pada tahun 1729, VOC memerintahkan semua produk emas di Gorontalo harus dijual kepada pos perusahaan dengan harga *f.* 10 per rial. Rendahnya harga yang dipatok, mendorong meningkatnya perdagangan emas yang dikuasai pedagang Bugis karena membeli harga yang lebih tinggi. Ramainya perdagangan emas Belanda menyebutnya penyelundupan atau

perdagangan gelap mengakibatkan pada tahun 1774, produk emas yang dikuasai VOC hanya sekitar seperdelapan dari jumlah produksi emas di Gorontalo (Henley, 2005:93-96).

Perdagangan emas di Gorontalo semakin ramai setelah munculnya para pedagang Makassar, Mandar, dan Cina yang ikut terlibat dalam perdagangan emas. Meningkatnya perdagangan yang dikerjakan pedagang pribumi, utamanya dari pedagang Bugis menyebabkan VOC mulai menekan perdagangan emas dan memonopolinya. Pada 22 Juli 1765, VOC menetapkan perjanjian kepada penguasa Gorontalo untuk melarang kegiatan pelayaran dan perdagangan bagi para pedagang pribumi dan asing di sungai-sungai dan pelabuhan Gorontalo, serta membangun benteng di Kwandang (Riedel, 1870:116) untuk mengawasi keluar masuknya para pedagang di Laut Sulawesi.

Pada abad ke-19, Gorontalo mengalami peningkatan dan perluasan produk tambang emas setelah ditemukannya kandungan emas. Penemuan ini membawa dampak meningkatnya jumlah perusahaan tambang emas yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi hampir meliputi seluruh kawasan Gorontalo. Pemerintah Hindia Belanda menaruh perhatian untuk mengatur dan memonopoli emas dengan membuat daftar penghasilan emas di Paguat tahun 1823, dan tahun 1828. Selain di Paguat, juga mendapatkan penyetoran emas dari berbagai tambang emas di wilayah Gorontalo. Pada tahun 1830 telah dilakukan ekspor emas pasir, perak, dan tembaga.

Pada umumnya kegiatan penambangan emas dikerjakan oleh orang-orang Bugis dari Bone secara berkelompok. Mereka diberi izin penambangan oleh *olongia* Gorontalo, dan diwajibkan membayar izin sebesar *f.* 30-35 dalam sekali penambangan. Pajak penambangan kemudian disetor *f.* 16 kepada Pemerintah Hindia Belanda. Pemasukan pajak penambangan tahun 1842 sebesar 799 rial, 1843 sebesar 662 rial, dan tahun 1844 sebesar 750 rial (Hoevell, 1850:266). Produksi emas tahun 1866 berjumlah 1.500 rial atau di nilai dengan uang kira-kira *f.* 45.000. Orang-orang Bugis menguasai tambang emas dengan berbagai cara termasuk menukarnya dengan candu (Riedel, 1870:91-92). Pedagang Bugis memasarkan produk emas sebagian besar ke Singapura, sehingga pada tahun 1846 jumlah produksi emas yang dipasarkan ke Singapura empat kali lebih besar dari jumlah yang dikirim ke Belanda (Henley, 2005:93-96).

### **C. Perdagangan Budak**

Sejak abad ke-16, budak merupakan salah satu komoditas perdagangan orang Bugis (Ricklefs, 2009:97). Sepanjang abad ke-18, perdagangan budak yang didukung oleh penguasa setempat berkembang menjadi aktivitas yang sangat menguntungkan. Setiap tahun sekitar 3.000 budak dikirim dari Makassar dengan keuntungan sekitar 100 gulden per kepala. Menurut Raffles bahwa:

Dari ribuan budak yang setiap tahun diekspor dari Makassar, sebagian besar dari mereka diculik oleh orang-orang suruhan bangsa Eropa, atau raja-raja setempat. Penjualan budak merupakan sumber pendapatan utama para raja. Ada beberapa agen kantor dagang Belanda di berbagai daerah yang memperdagangkan budak. Salah satu di antaranya mampu mengekspor sembilan ratus budak dalam setahun (Pelras, 2006: 339).

Pada 25 Maret 1678, Robertus Padtbrugge (Gubernur Maluku) mengajukan kontrak kepada Kuicil Bya (*Olongai* Gorontalo) yang memuat 24 pasal, di antaranya dalam pasal 15 dinyatakan bahwa pedagang VOC dibebaskan melakukan perdagangan budak; dan pasal 20 disebutkan bahwa penduduk di pantai Teluk Tomini dan perairan Gorontalo yang bukan penduduk Gorontalo tidak boleh ditangkap, kecuali mereka adalah budak yang mencoba melarikan diri. Jika hal itu terjadi, mereka wajib menangkap dan menyerahkannya kepada VOC dan akan memberikan ganti rugi sesuai dengan harga budak (Juwono dan Hutagalung, 2005:76-80). Pada tahun 1679, VOC memperbarui perjanjian di antaranya *Olongia* Gorontalo

diwajibkan menyerahkan 150 budak setiap tahunnya (Hasanuddin dan Amin, 2012:68).

Pada tahun 1683, VOC menekan Gorontalo melalui perjanjian tambahan tentang penyetoran emas sebanyak 2 kati dalam bentuk batangan setiap tahunnya dan diserahkan kepada pejabat VOC di Manado (Juwono dan Hutagalung, 2005:103-104). Sejak dikeluarkannya peraturan bagi penduduk Gorontalo diwajibkan menyerahkan emas setiap tahunnya, dan jika tidak mampu membayar setoran emasnya maka mereka dijual oleh pemimpinnya sebagai budak. Ratusan penduduk bersama istri dan anak-anaknya dijual sebagai budak kepada orang asing dan penduduk kaya dengan harga tinggi. Kebanyakan di antara mereka di ekspor ke Ternate dan Ambon. Perdagangan budak telah memberi keuntungan besar bagi VOC di Gorontalo (Riedel, 1870:68).

Pada abad ke-18, selain budak dari Gorontalo terdapat juga sejumlah besar budak yang didatangkan dari Tomini, dan kemudian dipasarkan ke Gorontalo (Henley, 2005: 208). Selama bertahun-tahun mereka dirampok dan dijarah, sehingga ribuan orang dijadikan budak baik wanita dan anak-anak oleh penguasa Tomini. Mereka dibawa ke Gorontalo dan dipasarkan ke Ternate. Hal ini menarik pedagang Bugis untuk melakukan perdagangan budak ke Gorontalo (Riedel, 1870:556).

Pada wilayah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, perdagangan budak praktek perdagangan budak masih berjalan secara teori dihapuskan sejak 1818, serta diputuskan semua budak harus didaftar (Pelras, 2006:361). Di Gorontalo, dikeluarkan peraturan tentang pajak budak yang tercatat tahun 1828, 1829, 1832, 1833 dan 1834. Kebijakan ini diputuskan karena budak merupakan perdagangan penting bagi pedagang Bugis. Pemerintah kolonial Belanda kemudian melakukan pendataan para budak, tercatat dimulai tahun 1822, 1823, 1828, 1830, 1831, 1833, dan 1840 dengan mendaftarkan nama budak, tempat lahir, umur, jenis kelamin, nama pemilik, perubahan pemilik, tanggal lahir, kematian, pergi ke tempat lain, datang dari tempat lain, pelarian dan pengembalian (Inventaris Arsip Gorontalo, 1810-1865).

Banyaknya jumlah budak di Gorontalo disebabkan berlakunya kontrak tanggal 9 Januari 1828, antara Mohammad Iskandar Pui Monoarfa dengan Pemerintah Hindia Belanda. Dalam pasal 10, tentang kewajiban membayar pajak berupa emas yang ditarik melalui setiap penduduk. Banyak penduduk yang tidak mampu membayar pajak, sehingga mereka dijual sebagai budak, agar hasil penjualannya dapat memenuhi pembayaran pajaknya (Hasanuddin dan Amin, 2012:76-78).

Sampai tahun 1850, perbudakan masih dominan dan kegiatan perdagangan budak dilakukan dalam jumlah besar di Gorontalo (Riedel, 1870:67). Pada tahun 1856, Assisten Residen van Baak dalam laporannya menyatakan bahwa jumlah penduduk Gorontalo sekitar 40.000 jiwa, dan 1/3 berada dalam perbudakan (Haga, 1931:10). Pada tahun 1859, Pemerintah Hindia Belanda menghapuskan sistem perbudakan di Gorontalo (Henley, 2005:43). Walaupun perbudakan telah dilarang, namun pedagang Bugis masih terus melakukan perdagangan budak (Pelras, 2006:360).

#### **D. Bajak Laut**

Dinamika pelayaran dan perdagangan di kawasan Teluk Tomini menjadi kompleks sejak munculnya bajak laut. Gambaran tentang bajak laut di kawasan Teluk Tomini, khususnya di Gorontalo dan hubungannya dengan bajak laut diketahui dari laporan Hart bahwa Gorontalo merupakan sarang bajak laut/perompak, namun pada pertengahan abad ke-19, kegiatan para perompak sudah tidak ada lagi, dan *Olongia* Gorontalo sudah sangat patuh kepada Pemerintah Hindia Belanda (Hart, 1853:226-227).

Pada 27 September 1677, Robertus Padtbrugge (Gubernur Maluku) bersama *Olongia*

Gorontalo melakukan pertemuan, salah satu pembahasannya adalah masalah bajak laut. Padtbrugge menyampaikan bahwa keamanan di Teluk Tomini dan pantai utara Sulawesi sangat rawan bagi kapal-kapal VOC. Hal ini menunjukkan banyaknya bajak laut berkeliaran di Teluk Tomini dan sulit ditaklukan oleh para penguasa di kawasan Teluk Tomini. Selanjutnya Padtbrugge memaksa *Olongia* Gorontalo mengakui perjanjian dibuatnya, antara lain pasal 8 memerintahkan *Olongia* Gorontalo wajib menjaga keamanan di wilayah perairannya dari gangguan bajak laut dan bajak laut yang ditangkap harus diserahkan kepada VOC (Juwono dan Hutagalung, 2005:74-75).

Pada tahun 1690, perompakan di pantai utara Sulawesi dan kawasan Teluk Tomini mengalami peningkatan. Para bajak laut dari Mangindano telah memperluas wilayah operasinya dari Filipina Selatan terus ke pantai utara Sulawesi sampai di kawasan Teluk Tomini. Mereka menggunakan jenis perahu *coro-coro* yang mampu menyusuri sungai dan pantai. Sasaran utama perompakannya adalah kapal-kapal dagang milik VOC (Juwono dan Hutagalung, 2005:107).

Di pantai utara dan timur Sulawesi juga muncul perompakan yang dilakukan para pelaut Bugis dan Makassar. Para bajak laut Bugis dan Makassar lebih memiliki strategi serta cara kerja yang lebih baik. Sepanjang wilayah operasinya, mereka mendirikan pangkalan-pangkalan yang letaknya strategis di antara pelabuhan besar atau dekat dari transit kapal dagang. Pangkalan mereka antara lain di Donggala berfungsi untuk mengawasi kegiatan kapal-kapal di Teluk Palu. Mereka juga mendirikan pangkalan di Kalangkangan untuk mengawasi pelabuhan Tolitoli dan Kwandang, dan mengawasi serta mencegat kapal-kapal yang memuat barang dagangan dari Gorontalo ke Manado atau sebaliknya. Setiap pangkalan mempunyai seorang pemimpin, dan mereka membentuk jaringan yang saling membantu ketika menghadapi musuhnya (Juwono dan Hutagalung, 2005:108-109).

Selain melakukan perompakan, beberapa bajak laut Bugis juga sebagai pedagang. Mereka melakukan kerjasama dengan para penguasa lokal, seperti Gorontalo, Limboto, Parigi dan Buol. Mereka menjual barang dagangan, seperti produk tekstil, beras, dan garam. Sebaliknya *olongia* dan bangsawan Gorontalo membayarnya dengan emas atau budak. *Olongia* dan bangsawan Gorontalo memandang peluang dengan memperoleh keuntungan lebih besar jika transaksi dengan pedagang Bugis, dibandingkan melakukan transaksi bersama VOC dengan harga yang telah ditetapkan melalui kontrak/perjanjian.

Pada abad ke-18, terjadi peningkatan jumlah perompakan kapal-kapal dagang VOC. Munculnya pelaut Mandar sebagai bajak laut di perairan Gorontalo telah menambah semakin meningkatnya perompakan di kawasan Teluk Tomini. Bajak laut Mandar mendirikan pangkalannya di Gorontalo agar mudah mengawasi perairan Gorontalo di kawasan Teluk Tomini. Laporan banyaknya kejadian perompakan menyebabkan Gubernur Maluku di Ternate, Pieter Rooselaar mengambil tindakan untuk mengusir para bajak laut di Gorontalo. Pada tahun 1702, Rooselaar mengirim armada lautnya yang mendapat bantuan dari penduduk Tambora menyerang basis pangkalan Bugis dan Mandar, dan berhasil mengusirnya. Pada 25 Februari 1703, Rooselaar menarik kembali armadanya ke Ternate (Juwono dan Hutagalung, 2005:110-111), setelah mengetahui bajak laut Bugis dan Mandar tidak kembali lagi ke Gorontalo.

Sehubungan aktivitas perompakan yang dilakukan oleh para pelaut Bugis, Mandar, dan Mangindano di perairan Gorontalo. Pada tahun 1705, VOC mendirikan benteng di muara Sungai Gorontalo dikenal dengan nama *Fort Nassau* dan beberapa loji untuk melindungi perdagangannya dari serangan para bajak laut di perairan Gorontalo. Kemudian mendirikan kantor dagang (*factory*) dan sekaligus gudang penampungan barang (*pakhuis*) ekspor. Bahan pembuatan benteng dibebankan kepada *Olongia* Gorontalo sesuai dengan perjanjian tahun

1679 (Hasanuddin dan Amin, 2012:68).

Walaupun pangkalannya di Gorontalo telah dihancurkan, namun bajak laut Mandar masih aktif melakukan perompakan. Pada 20 Nopember 1713, kapal dagang VOC "*Noodhulp*" mengangkut hasil bumi dan rempah-rempah di Lambunu, Teluk Tomini telah dirompak oleh bajak laut Mandar. Mereka kemudian membunuh *Onderkoopman* Nicolaes van Beverwijk, sedangkan asistennya Johannes Truytman mengalami luka-luka. Gubernur Maluku, David van Peterson mengecam kejadian tersebut, kemudian melakukan pembalasan dengan mengirim sejumlah *kora-kora* di Lambunu, namun usahanya mengalami kegagalan (Juwono dan Hutagalung, 2005:114).

Gubernur Maluku memerintahkan *Olongia* Gorontalo yang mempunyai pengaruh besar di kawasan Teluk Tomini untuk menyelesaikan keamanan di wilayahnya. Walaupun mendapat persetujuan dari *olongia*, tetapi sebagian besar bangsawan menolak perintah VOC. Para bangsawan menyadari tekanan politik VOC melalui perjanjian-perjanjian yang dibuatnya sangat merugikan Gorontalo. Mereka lebih suka berhubungan dengan para bajak laut Bugis dan Mandar yang lebih banyak memberi keuntungan daripada menjalin hubungan dagang dengan VOC. Tidak mengherankan beberapa bangsawan memberikan kemudahan bagi aktivitas para bajak laut dalam melakukan perdagangan dan memberi perlindungan, sehingga bajak laut sulit ditangkap oleh VOC.

Pada 30 Nopember 1716, *Olongia* Gorontalo menyurat kepada penguasa VOC di Manado agar mengirim armadanya ke Teluk Gorontalo (Teluk Tomini). Tujuannya adalah untuk mengusir bajak laut Bugis yang bernama Sa.rena bersama seratus anak buahnya mendarat di daerah Mabampa. Kelompok Sa.rena sering melakukan berbagai tindakan kekerasan di daerah pantai, di antaranya menangkap orang-orang Gorontalo untuk dijadikan budak dan menjualnya ke Buton. Di Buton, para budak ditukarkan dengan barang-barang selundupan, terutama beberapa peti amunisi (Juwono dan Hutagalung, 2005:121).

Semakin rapatnya pengawasan VOC melalui patroli kapal perangnya di kawasan Teluk Tomini, menyebabkan para bajak laut Bugis dan Mandar mengalihkan pangkalannya di Buol, karena mereka telah menjalin hubungan kerjasama dagang dengan *madika* dan bangsawan Buol. Pada 30 Nopember 1722, terjadi konflik antara Buol dengan Gorontalo dan Limboto disebabkan penduduk Tomboli melarikan diri ke Buol. *Olongia* Gorontalo meminta *Madika* Buol untuk mengembalikan penduduk Tomboli ke Gorontalo, namun mendapat penolakan. Akhirnya Adrian van Leene (penguasa VOC di Manado) turun tangan untuk menyelesaikan konflik kedua kerajaan tersebut. Leene berangkat ke Buol untuk mengembalikan penduduk Tomboli, namun mendapat penolakan dari *Madika* Buol, bahkan kemudian kapalnya diserang lima puluh perahu Bugis dan Mandar sampai di muara Gorontalo (Juwono dan Hutagalung, 2005:122-123).

Akibat peristiwa Leene, dan seringnya berkeliaran bajak laut Bugis dan Mandar di perairan Gorontalo dan Teluk Tomini. J. Christiaan Pielat (Gubernur Maluku) mengambil keputusan untuk membasmi bajak laut Bugis dan Mandar. Kemudian mengutus Kapten Elias van Stade dengan armadanya ke Gorontalo. Kapten Stade menyusuri Teluk Tomini dan berhasil mengusir para bajak laut Bugis dan Mandar di perairan Teluk Tomini. Kapten Stade kemudian melanjutkan perjalanannya ke Buol, dan berhasil menekan *Madika* Buol untuk memenuhi tuntutan Gorontalo agar melepaskan penduduk Tomboli (Juwono dan Hutagalung, 2005:123-124).

Pada tahun 1750-an, bajak laut Mandar dipimpin Daeng Mapata memperluas kegiatan operasinya di wilayah pesisir Gorontalo sebagai jalur pelayaran kapal-kapal pengangkut produk berupa emas, hasil bumi, dan hasil hutan. Daeng Mapata memiliki hubungan dagang

dengan Botutihe (*Olongia* Gorontalo) dan bangsawan Gorontalo. Daeng Mapata membawa hasil-hasil hutan berupa kayu, lilin, madu, damar, getah, dan rotan di Gorontalo (Juwono dan Hutagalung, 2005:166). Bagi pedagang Bugis, Mandar, dan Makassar seringkali membawa barang dagangan yang dilarang diperdagangkan oleh VOC, seperti senjata, amunisi, dan candu di Gorontalo. Kembalinya membawa yaitu budak yang merupakan komoditas utama dan menghasilkan keuntungan besar di Makassar.

Terjalannya hubungan dagang antara *olongia* dan bangsawan Gorontalo dengan para bajak laut Bugis dan Mandar menyebabkan VOC mengalami kerugian besar. VOC menuduh *Olongia* Gorontalo melanggar perjanjian yang telah disepakati yaitu mengusir para bajak laut dari daerahnya. Sebaliknya, para bangsawan melindungi para bajak laut Bugis dan Mandar. Peranan benteng VOC "*Nassau*" yang letaknya di muara Sungai Gorontalo dengan sejumlah pasukan untuk mengamankan kepentingan ekonominya ternyata tidak banyak membantu mencegah aktivitas para bajak laut. Begitu pula kurangnya jumlah kapal VOC di perairan Gorontalo menyebabkan tidak efektifnya pengawasan dan kontrol terhadap para bajak laut di kawasan Gorontalo. Perebutan daerah-daerah potensial penghasil komoditas penting antara VOC dengan pedagang Bugis dan Mandar seringkali menimbulkan konflik untuk menguasai suatu daerah yang dianggap strategis.

Pada tahun 1790, di Kwandang hampir terjadi penyerangan terhadap pasukan wakil VOC yang dilakukan oleh bajak laut Bugis dipimpin Puang Nyili. Penyerangan Puang Nyili mendapat bantuan dari bajak laut Ilanun. Faktor kemarahan Puang Nyili disebabkan wakil VOC di Kwandang telah membunuh putranya bernama Labajo bersama semua pengikutnya, karena tanpa izin dari VOC mereka memasuki wilayah Kwandang. Mengetahui kabar dibunuhnya Labajo, menyebabkan Puang Nyili ingin membalas kematian anaknya dan pengikutnya. Namun, penyerangan mengalami kegagalan setelah bantuan pasukan dari Ternate tiba di Kwandang (Riedel, 1870:117).

Pada abad ke-19, perompakan di kawasan Teluk Tomini mengalami peningkatan, walaupun seringkali dilakukan patroli kapal perang Belanda. Laporan umum Asisten Residen Gorontalo, pada tahun 1824, 1832, 1833, dan 1834 terjadi jumlah perompakan yang cukup besar. Asisten Residen Gorontalo kemudian menyurat kepada Gubernur Jenderal Hindia-Belanda di Batavia tentang aktivitas para bajak laut, dan meminta bantuan Gubernur Jenderal untuk secepatnya menumpas para bajak laut yang telah mengganggu pelayaran dan perdagangan di wilayahnya. Laporan Asisten Residen Gorontalo ditanggapi serius dengan menempatkan sebuah kapal uap perang untuk mengawasi bajak laut di perairan Gorontalo (Rosemberg, 1865:15).

Dalam pelayaran Monoarfa (*Olongia* Gorontalo), bersama Lihawa (*Olongia* Paguat), tuan Kumis *meneer* Porpiser, dan dua *jogugu* dari kerajaan Gorontalo dan Paguat bertemu dengan bajak laut dari Tobelo di Bumbula. Bajak laut Tobelo menyerang kapal *Olongia* Monoarfa. Penyerangan bajak laut Tobelo berhasil digagalkan oleh rombongan *Olongia* Monoarfa. Setelah mengalami kegagalan, para bajak laut Tobelo memilih melarikan diri. Peristiwa penyerangan bajak laut Tobelo, dan masih seringnya terjadi perompakan di perairan Gorontalo yang secara langsung menghambat jalur perdagangan Gorontalo, maka *Olongia* Monoarfa meminta bantuan orang-orang Bugis untuk mengamankan dan mengusir bajak laut di perairan Gorontalo.

Pertengahan abad ke-19, orang-orang Mandar telah mendominasi kegiatan perdagangan dan perompakan, sedangkan kegiatan bajak laut Bugis mulai mengurangi aktivitasnya. Walaupun Bugis mengurangi aktivitasnya, tetapi kegiatan perompakan masih sering terjadi, dan Pemerintah Hindia Belanda semakin meningkatkan patroli kapal perangnya di kawasan Teluk Tomini. Pada tahun 1878, terjadi perubahan strategi dalam kegiatan perompakan.

Mereka tidak lagi melakukan perompakan secara terbuka, namun mereka hanya menunggu kapal-kapal dagang atau melakukan penjarahan di kampung-kampung, seperti terjadi pada bajak laut Tobelo menjarah dan menculik penduduk kampung-kampung di Banggai. Semakin ketat pengawasan kapal patroli Belanda menyebabkan semakin sempitnya ruang gerak para bajak laut. Akhirnya banyak pemimpin bajak laut Tobelo menyerahkan diri kepada Pemerintah Hindia Belanda. Salah satu pemimpin paling berpengaruh dan ditakuti bernama Medo atau Medomo bersama anak buahnya menyerahkan diri kepada Pemerintah Hindia Belanda (Velthoen, 2010:215).

Perompakan di Teluk Tomini dan pantai utara Sulawesi sering dianggap sebagai bentuk menentang penindasan oleh pihak yang lemah terhadap mereka yang mendominasi. Para bajak laut di Teluk Tomini yang terkenal selama abad ke-19 adalah Tombolotutu, seorang bangsawan dianggap oleh penduduk setempat sebagai tokoh yang bangkit menentang dominasi politik dan ekonomi Pemerintah Hindia Belanda (P.J. Veth, 1870:175-176).

Pemberontakan Tombolotutu disebabkan pada tanggal 3 Juni 1898, penobatan Raja Moutong bernama Daeng Malino berasal dari garis pria keturunan Mandar yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kurangnya pemahaman Pemerintah Hindia Belanda tentang tradisi dan adat Kajeli yang lebih mengutamakan mereka yang diturunkan dari garis wanita, sehingga seharusnya yang menjadi raja adalah Tombolotutu (Poidarawati) karena merupakan pewaris tahta yang sebenarnya. Pengangkatan Daeng Malino sebagai Raja Moutong bertujuan untuk mempertahankan perampas tahta, tidak menimbulkan kerugian bagi Belanda karena Tombolotutu tidak dapat diajak kerjasama, dan Tombolotutu dituduh sebagai pemberontak, dan dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan (Soerabajasch Handelsblad, 1902:1).

Dalam dekade awal abad ke-20, kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda menghadapi perlawanan para bajak laut berakhir, hampir sebagian abad ke-19 kapal-kapal perang Belanda diperintahkan untuk selalu aktif melakukan patroli. Hal ini kemudian menjadi penting dalam pengembangan kemaritiman jalur perdagangan di kawasan Teluk Tomini dan bagian utara Sulawesi.

### **E. Perkampungan Bugis**

Merantau bagi orang Bugis adalah bagian dari budayanya sebagai suku yang genar merantau. Mereka menyebar di seluruh wilayah Teluk Tomini dengan aktivitas dalam pelayaran, perdagangan, pertanian, pembukaan lahan perkebunan, atau pekerjaan apa saja yang mereka anggap sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Kemampuan untuk berubah dan menyesuaikan diri merupakan modal terbesar, sehingga mereka dapat hidup di kampung-kampung mana saja selama berabad-abad. Walau mereka terus menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya, orang Bugis ternyata tetap mampu mempertahankan identitasnya dan menyatu dalam solidaritas yang kuat.

Orang-orang Bugis sebelum masuknya kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda telah bermukim di Gorontalo. Setelah masuknya kekuasaan kolonial Belanda, orang-orang Bugis melakukan perlawanan kekuasaan kolonial Belanda dan para kepala pribumi. Mereka menghasut penduduk untuk melakukan perlawanan dan menampung semua pelarian yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda (Riedel, 1870:67-69). Kegiatan provokasi dan tindakan-tindakan melawan kekuasaan kolonial Belanda dan kepala pribumi yang dipimpin Hukala, Badahati, Tilakula, dan seorang perempuan bernama Rahmiati seringkali dianggap mengganggu kehidupan penduduk Gorontalo. Pada 31 Maret 1791, Raja Muhammad Hasanuddin Iskandar Panglima Syah mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting untuk dapat membantu menyelesaikan kebiasaan buruk orang-orang Bugis

yang telah mengganggu ketentraman penduduk Gorontalo (Mu.jizah, 2009:144).

Perkampungan Bugis di Gorontalo, berawal dari kedatangan pedagang Bone membentuk perkampungan serta mengembangkannya dalam kerajaan kecil bernama Bone. Mereka mendiami sekitar Sungai Bone dan Pantai Bone. Menurut Henley (2005:87) bahwa pada awal abad ke-19, pelayaran dan perdagangan di Gorontalo umumnya dikuasai oleh orang-orang Bugis. Laporan Rosenberg (1865:100) memberikan gambaran bahwa terdapat lima kampung yang dihuni oleh orang-orang Bone. Kampung Bugis mengalami perkembangan setelah *Olongia* Monoarfa melalui *apitalau* (panglima laut) meminta bantuan orang-orang Bugis untuk membantu mengusir para bajak laut Tobelo dan Mangindanao yang berkeliaran di perairan Gorontalo. Setelah itu mereka berhasil mengusirnya, dan mereka diberi tempat sampai di muara Sungai Bone (Henley, 2005:196).

Di Banggai, koloni Bugis tersebar di wilayah daerah-daerah pesisir Banggai. Koloni Bugis membentuk perkampungan dengan pemerintahan sendiri serta berswadaya. Koloni Bugis mempunyai ikatan keluarga dengan orang-orang Bugis dari Wani, Palu, dan Gorontalo (Dormeier, 1947:46-47). Mereka diberi kebebasan dalam mengatur masyarakatnya. Di Bunta terdapat seorang *mayor* Gorontalo yang membawahi koloni Gorontalo, namun di bawah kekuasaan seorang *kapitan* Bugis. Koloni Bugis selama bertahun-tahun mendapat pengakuan Pemerintah Hindia Belanda sebagai distrik bawahan (*sub-distrik*), dan dipimpin seorang kepala bergelar *kapitan* (Dormeier, 1947:82).

Di Kasimbar dan Moutong sebagian besar dihuni oleh orang-orang dari Bugis. Hal ini disebabkan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda boleh dikatakan tidak ada, maka terbukalah kesempatan bagi pelaut dan pedagang Bugis menanamkan pengaruh kekuasaannya (Kartodirdjo, dkk, 1973:394). Di Parigi, pengaruh kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda sangat kurang, sehingga memberi kesempatan bagi Bone untuk menguasainya. Kemudian Parigi menjadi negeri bawahan Bone dan membayar upeti setiap tahunnya. Pada tahun 1847, terdapat seorang bangsawan dari Bone bertugas sebagai syahbandar untuk memungut berbagai pajak dan upeti (Kartodirdjo, dkk, 1973:394-395).

Di Tinombo (Siavu), terdapat pemukiman pesisir temporer bagi pedagang Bugis. Banyak kaum laki-laki imigran menikahi wanita Lautje yang menetap di kaki bukit. Akhirnya Tinombo menjadi perkampungan yang ramai, hal yang sama terjadi di pemukiman-pemukiman pendatang yang terdapat di sepanjang pesisir Teluk Tomini, dengan dermaga dan sejumlah gudang milik pedagang Bugis, Mandar, dan Gorontalo (Nourse, 2005:225).

Wilayah Tojo membentang di sepanjang bagian selatan Teluk Tomini, di sepanjang pantai ditemukan pemukiman dan sebagian besar dijumpai orang-orang Bugis (Bone), yang telah menikah dengan penduduk pribumi. Bentuk rumah mendapat pengaruh gaya arsitektur Bugis dengan tinggi berbentuk rumah panggung (Hoewel, 1893:2-3).

Pulau Togian pada umumnya dihuni oleh orang-orang Bugis, dan banyak bergantung dari kekuasaan Bone di Tojo. Mata pencaharian penduduk Togian terutama pada penangkapan ikan, teripang dan penyu yang banyak ditemukan di laut. Selain itu, mengumpulkan tumbuhan-kerang, semacam kerang mutiara kecil. Komoditas utama dari Togian, seperti di Binang-Oenang (Una-Una) adalah kopra yang mempunyai kualitas yang sangat baik. Produksi kopra meningkat setiap tahunnya. Kesemuanya dibeli oleh pedagang Bugis, baik pemukiman di pantai maupun di suku Alfuru di pedalaman, sehingga mendapatkan banyak keuntungan bagi perdagangannya (Hoewel, 1893:7-11).

Di Sausu, penduduknya berasal dari Gorontalo, Parigi, Tojo, dan paling utama adalah Bugis. Sausu telah menarik para pedagang Bugis untuk mencari hasil hutan, garam, kerbau dan padi. Sistem perdagangan ini seluruhnya barter. Kadangkala pedagang menukarnya

dengan sarung. Kehidupan sehari-hari, kaum pria di Sausu mengenakan celana pendek model Bugis (Hoevel, 1893:39-43).

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kegiatan pelayaran dan perdagangan orang Bugis di kawasan Teluk Tomini didorong karena tradisi merantau (*sompeq*). Pelayaran dan perdagangan Bugis dikembangkan oleh orang Bone yang bermukim di Cendrana, Bajoe, dan Kajuara. Mereka berlayar sampai ke kawasan Teluk Tomini. Teluk Tomini terkenal dengan kaya akan potensi alam dan menghasilkan komoditas perdagangan berupa hasil laut (sisik penyu, kerang laut, dan teripang), hasil tambang (emas dan bijih besi), hasil hutan (damar, lilin, kayu cendana, dan rotan), hasil perkebunan (kopra), sarang burung, dan budak. Faktor ini menjadi pendorong bagi pedagang Bugis mengangkut komoditas tersebut dan memasarkannya ke pelabuhan-pelabuhan yang disinggahinya terutama Ternate, Singapura, dan Makassar.

Di kawasan Teluk Tomini, utamanya Gorontalo mengalami kemajuan dan berkembang menjadi pusat perdagangan. Kemajuan Gorontalo mendorong VOC untuk menjadi saingan pedagang Bugis dengan memonopoli perdagangan emas dan budak yang juga diminati Portugis. Walaupun berbagai kebijakan dikeluarkan VOC dan kemudian Pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai emas, budak, dan produk lainnya tetapi sebagian tetap dikuasai pedagang Bugis.

Hampir di seluruh kawasan Teluk Tomini terdapat perkampungan Bugis, dan beberapa di antaranya berhasil dikuasainya. Kekuasaan Bugis dari Bone juga membawahi orang-orang Bajo di Pagimana, serta daerah-daerah Parigi, Tojo, Togian, dan Sausu. Mereka juga menanamkan pengaruhnya di Tobungku dan Banggai, serta membantu perlawanan penguasa lokal, seperti Raja Banggai, bernama Agama melawan kekuasaan Sultan Ternate. Pedagang Bugis secara *de facto* memegang hegemoni politik dan ekonomi di kawasan Teluk Tomini.

#### B. Saran

Gambaran mengenai pelayaran dan perdagangan orang Bugis di kawasan Teluk Tomini terlihat masih kurang memberi keterangan yang lengkap. Untuk itu perlu kajian lanjutan bagi peranan pelayaran dan perdagangan di daerah-daerah yang ada di kawasan Teluk Tomini, sehingga dapat mengungkapkan sejarah maritim di kawasan Teluk Tomini lebih lengkap.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Arsip yang Diterbitkan

Kartodirdjo, S., dkk., (1973). *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5. Jakarta: ANRI.

#### Artikel/Buku

Andaya, L. Y., (2015). *Dunia Maluku Indonesia Timur Pada Zaman Modern Awal*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Asba, A. R., (2007). *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Dick, H.W., (1975). "Perahu Shipping in Eastern Indonesia", dalam *Bulletin of Indoensian Economic Studies II*, 2, hlm. 69-107.

- Dormeier, J.J., (1947). "Banggaisch Adatrecht", dalam *Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (VKI)*, VI. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Haga, B.J., (1931). *De Limo-pahalaä (Gorontalo): Volksordening, adatrecht en bestuurspolitiek*, LXXI. Bandoeng: A.C Nix & Co.
- Hart, C. Van der., (1853). *Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche eilanden.*, s Gravenhage: K. Fuhri.
- Hasanuddin dan Basri Amin, (2012). *Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Henley, D., (2005). *Fertility, Food and Fever: Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930*. Leiden: KITLV.
- Hoevel, G.W.W.C Baron van, (1891). "Onder Rechtstreeksch Bestuur Is Gebracht", *De Assistant-Residentie Gorontalo*. Leiden: E.J Brill.
- , (1893). "Tojo, Posso en Saoesoe", dalam *Tijdschrijt voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde (TBG)*, XXXV.
- Hoeverell, W.R. van, (1850). "Lets Over de Goudgraverijen in de Residentie Menado", dalam *Tijdschrijt voor Nederlandsch-Indie (TNI)*, Vol. 12.
- Juwono, H. dan Yosephine Hutagalung, (2005). *Limo Lo Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lapian, A. B., (2011). *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Mu.jizah, (2009). *Illuminasi: dalam Surat-Surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nourse, J. W., (2005). "Sawerigading Di Tanah Asing: Mitos I La Galigo", dalam *Tapak-Tapak Waktu*. Makassar: Inninawa.
- Pelras, C., (2006). *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar Forum Jakarta-Paris Paris École française d'Extrême-Orient. (Translation of *The Bugis*. Oxford: Blackwell, 1996).
- Poelinggomang, E. L., (2002). *Makassar Abad XIX. Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rahman, N., (2006). *Cinta, Laut, dan Kekuasaan: Dalam Epos La Galigo*. Makassar: La Galigo Press.
- Riedel, G. J. F., (1870). "Het landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Katinggola of Andagile: geographische, statistische, historische en ethnographische aantekeningen", dalam *Tijdschrijt voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde (TBG)*, XIX, hlm. 46-153.
- , (1870). "De Vestiging Der Mandaren in de Tomini-Landen", dalam *Tijdschrijt voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde (TBG)*, XIX, hlm. 555-564.
- Ricklefs, M.C., (2009). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Rosemberg, C.B.H von, (1865). *Reistogten in de afdeeling Gorontalo, gedaan op last der Nederlandsch Indische regering*. Amsterdam: Muller.
- Tobing, Ph. O.L., (1977). *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi.
- Velthoen, E., (2010). "Pirates in the Periphery: Eastern Sulawesi 1820-1905", *Pirates, Ports, And Coats In Asia* (Historical and Contemporary Perspectives). John Kleinen dan Manon Osseweijer (ed.). Series on Maritime Issues and Piraty in Asia. Singapore: IIAS/ISEAS.
- Veth, P.J., (1870). "De Zeeroverij in den Indischen archipel, Als Een Bijzondere Vorm van de heilige Oorlog Tegen Ongeloovigen Berschouwd", dalam *Tijdschrijt voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde (TBG)*, I.

**Surat Kabar**

"Theorie en Praktijk", dalam *De Java Bode*, tanggal 19 Juni 1890, lembar ke-1.  
"Gorontalo", dalam *Soerabajasch Handelsblad*, 29 Oktober 1902, lembar ke-1.

**Internet**

"Limits of Oceans and Seas, 3rd edition". International Hydrographic Organization, 1953.  
<https://epic.awi.de/29772/1/IHO1953a.pdf>. Diakses tanggal 22 Januari 2016.